

## ANALISIS KETIMPANGAN PENDAPATAN ANTAR 4 KOTA DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Bryan Enrico Rosang<sup>1</sup>, Ita Pingkan F. Rorong<sup>2</sup>, Krest D. Tolosang<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Sam Ratulangi, Manado 95115, Indonesia

Email : [bryanrosang52@gmail.com](mailto:bryanrosang52@gmail.com)

### ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama perkembangan suatu daerah. Pertumbuhan yang berkelanjutan menjadi faktor utama bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk melihat ketimpangan pendapatan yang ada pada 4 Kota di Sulawesi Utara. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan bersifat kuantitatif dengan analisis Indeks Williamson. Hasil penelitian ini berdasarkan analisis Kuantitatif dengan analisis Indeks Williamson mendapati bahwa 4 Kota yang ada pada Provinsi Sulawesi Utara yakni Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu memiliki hasil bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah tinggi dan bersifat stabil selama sepuluh tahun terakhir. Meskipun terjadi fluktuasi, seperti penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi, secara umum tren menunjukkan bahwa wilayah maju terus tumbuh lebih cepat dibanding wilayah tertinggal, sehingga disparitas tetap berada pada level tinggi. Hasil ini menegaskan perlunya intervensi kebijakan yang lebih efektif dan terarah untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah. Strategi yang dapat dilakukan meliputi pembangunan infrastruktur yang merata, pemerataan investasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi lokal di wilayah tertinggal. Tanpa langkah-langkah tersebut, ketimpangan pembangunan berpotensi terus berlanjut dan menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas ekonomi dan sosial jangka panjang.

**Kata Kunci :** Pembangunan, Perencanaan Pembangunan, Kuantitatif, Indeks Williamson.

### ABSTRACT

*Economic growth is a key indicator of a region's development. Sustainable growth is a key factor in the sustainability of economic development and improving public welfare. The purpose of this study was to examine income inequality in four cities in North Sulawesi. This study used secondary data and was quantitative in nature, using the Williamson Index analysis. This study, based on quantitative analysis using the Williamson Index, found that four cities in North Sulawesi Province Manado, Bitung, Tomohon, and Kotamobagu have high and stable inter-regional development disparities over the past ten years. Despite fluctuations, such as a decline in 2020 due to the pandemic, the general trend shows that developed regions continue to grow faster than underdeveloped regions, so disparities remain high. These results underscore the need for more effective and targeted policy interventions to reduce inter-regional disparities. Strategies include equitable infrastructure development, equitable investment, human resource capacity development, and strengthening local economies in underdeveloped regions. Without these measures, development disparities have the potential to persist and negatively impact long-term economic and social stability*

**Keywords:** Development, Development Planning, Quantitative, Williamson Index.

### 1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama perkembangan suatu daerah dan menjadi faktor penting dalam keberlangsungan pembangunan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dalam menciptakan pemerataan hasil pembangunan dan mengurangi ketimpangan pendapatan antarwilayah. Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, manfaat pembangunan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga kesenjangan pendapatan masih menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Ketimpangan pendapatan muncul akibat perbedaan sumber daya, kondisi demografi, dan tingkat pembangunan yang menyebabkan adanya kesenjangan kesejahteraan antar daerah. Oleh karena itu, analisis ketimpangan pendapatan menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana pembangunan ekonomi telah berjalan secara merata.

Dalam konteks Provinsi Sulawesi Utara, perbedaan tingkat pembangunan antar kota dapat dilihat melalui nilai PDRB per kapita atas dasar harga konstan. Data PDRB per kapita empat kota di Sulawesi Utara selama tahun 2015–2024 menunjukkan adanya perbedaan yang cukup signifikan, terutama antara Kota Manado dengan Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketimpangan pembangunan dan distribusi pendapatan antar wilayah yang berpotensi menimbulkan kesenjangan kesejahteraan masyarakat.

**Tabel 1. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Menurut 4 Kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2024**

Tahun	Kota Manado	Kota Bitung	Kota Tomohon	Kota Kotamobagu
2015	19.773,19	9.064,84	2.464,34	1.855,96
2016	21.193,83	9.537,54	2.565,30	1.979,11
2017	22.622,64	10.127,35	2.792,17	2.113,41
2018	24.126,54	10.735,83	2.963,09	2.254,15
2019	25.585,61	11.171,83	3.163,46	2.392,38
2020	24.778,18	11.325,10	3.150,49	2.396,96
2021	26.053,89	11.846,01	3.211,88	2.498,05
2022	27.523,56	12.510,23	3.378,01	2.626,20
2023	29.041,61	13.218,72	3.557,70	2.768,43
2024	30.648,17	13.893,82	3.726,48	2.914,84

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Utara 2025

Berdasarkan data tersebut, Kota Manado secara konsisten memiliki nilai PDRB per kapita tertinggi dibandingkan tiga kota lainnya. Perbedaan yang cukup besar ini menunjukkan adanya disparitas pembangunan ekonomi antar wilayah yang perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat ketimpangan pendapatan antar empat kota di Provinsi Sulawesi Utara menggunakan metode Indeks Williamson. Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah adalah sebagai berikut yaitu: bagaimana tingkat ketimpangan pendapatan antar 4 kota di Provinsi Sulawesi Utara?

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pengertian pertumbuhan ekonomi menurut Kuznets adalah kenaikan kapasitas jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya (Todaro, 2011). Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP atau GNP tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan ukur dengan meningkatnya hasil produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu Negara, seperti penambahan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, perkembangan sektor jasa dan perkembangan nasional riil suatu Negara (Arsyad, 2010). Kemajuan ekonomi suatu daerah menunjukkan keberhasilan suatu pembangunan meskipun bukan merupakan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan (Todaro, Smith, 2006).

Pertumbuhan ekonomi merujuk pada perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara terus-menerus menuju keadaan yang lebih baik dalam periode tertentu. Ini juga dapat diartikan sebagai peningkatan kapasitas produksi suatu perekonomian yang tercermin dalam kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi telah berhasil (Sukirno, 2000). Meningkatnya aktivitas ekonomi mendorong bertambahnya produksi barang dan jasa, yang pada gilirannya turut meningkatkan taraf hidup masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga mencerminkan kemampuan kegiatan ekonomi dalam menaikkan pendapatan masyarakat selama periode waktu tertentu. Karena kegiatan ekonomi melibatkan penggunaan berbagai faktor produksi untuk menghasilkan output, maka hal ini secara langsung turut menciptakan distribusi pendapatan di tengah masyarakat (Basri, 2010). Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, dimana penekanannya pada tiga hal yaitu proses, output perkapita dan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu “proses” bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini dilihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. tekanannya pada perubahan atau perkembangan itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi juga berkaitan dengan kenaikan output perkapita. Dalam pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab hanya apabila kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output perkapita bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat (Boediono, 2002).

## 2.2 Teori Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan di sektor pariwisata merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata sehingga dapat menjadi salah satu sektor unggulan dan penyumbang devisa bagi negara. Menurut Arsyad (2010), terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan:

1. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah yang efektif harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara daerah dengan lingkungan nasional, karena daerah merupakan bagian dari sistem nasional tersebut. Hubungan yang erat antara keduanya memiliki dampak penting terhadap hasil interaksi yang terjadi.
2. Sesuatu yang dinilai positif di tingkat nasional belum tentu memberikan dampak yang sama di tingkat daerah, dan sebaliknya, kebijakan atau program yang bermanfaat di tingkat daerah belum tentu selaras dengan kepentingan nasional.
3. Ketersediaan institusi pendukung pembangunan daerah, seperti sistem administrasi, mekanisme pengambilan keputusan, dan kewenangan, sering kali berbeda antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Pembangunan adalah upaya berkesinambungan menciptakan keadaan yang dapat menyediakan lebih banyak alternatif yang sah bagi setiap warga negara untuk mencapai aspirasinya yang paling humanistik (Mahi dan Trigunarso, 2017). Pendekatan yang paling humanistik yang ingin dicapai, maka kepentingan untuk menghadirkan pemenuhan kepentingan dari berbagai pihak sangat perlu menjadi sekala prioritas, hal ini dapat dilakukan melalui perencanaan pembangunan yang komprehensif, dan melibatkan banyak pihak. Dalam teori perencanaan tiga hal utama harus dipahami, yaitu:

1. Definisi Perencanaan yang dapat ditinjau dari berbagai dimensi antara lain:
  - a. Dipandang dari sudut kegiatan manusia yang terkandung dalam tingkahlaku manusia pada semua tingkatan masyarakat. Dimana perencanaan dipandang sebagai suatu proses pemikiran dan tindakan manusia yang berorientasi ke masa depan;
  - b. Dari sudut rasionalitas, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan-tindakan yang sesuai melalui tahapan pemilihan; dan
  - c. Ditinjau dari sudut pemecahan masalah, bahwa perencanaan adalah proses pemecahan masalah yang ditujukan pada jenis-jenis masalah yang spesifik.
2. Substantif perencanaan, yaitu apa yang akan direncanakan dan untuk siapa merencanakannya?
3. Normatif perencanaan menyangkut bagaimana dan apa alasan perencanaan yang akan disusun (Mahi dan Trigunarso, 2017).

Perencanaan pembangunan merupakan tahapan awal dalam proses pembangunan sebelum terjadinya pelaksanaan pembangunan. Suatu proses yang berkesinambungan untuk menetapkan tujuan-prioritas yang ingin dicapai kearah yang lebih baik secara terencana melalui tahapan-tahapan dengan melibatkan berbagai unsur dalam mengalokasikan sumber daya dengan tujuan akhir untuk mensejahterakan masyarakat sosial di lingkungan/daerah/wilayah dengan jangka waktu tertentu merupakan arti dari perencanaan.

## 2.3 Teori Ketimpangan

Menurut Kuncoro (2006), ketimpangan merujuk pada perbedaan standar hidup relatif di antara seluruh lapisan masyarakat. Perbedaan ini menyebabkan tingkat pembangunan yang bervariasi di berbagai wilayah, sehingga menciptakan kesenjangan atau jurang kesejahteraan antar wilayah (Noor et al., 2010). Ketimpangan atau disparitas antar daerah adalah fenomena yang umum dalam kegiatan ekonomi suatu wilayah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam sumber daya alam serta kondisi demografi di setiap wilayah, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan daerah dalam mendorong proses pembangunan.

Ketimpangan pendapatan adalah terdapatnya perbedaan yang di terima atau dihasilkan oleh Masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional di antara Masyarakat. (Todaro & Smith, 2006). Ketimpangan pendapatan merupakan suatu konsep yang membahas tentang penyebaran pendapatan setiap orang atau rumah tangga dalam Masyarakat (Sukirno, 2006). Ketimpangan atau disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini yang membuat kemampuan suatu daerah dalam kegiatan mendorong proses Pembangunan juga menjadi berbeda (Kuncoro, 2006). Ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat. Perbedaan ini yang membuat Tingkat Pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut. (Sukirno, 2010).

**2.4 Hubungan Antara Ketimpangan Pendapatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Antar 4 Kota di Sulawesi Utara**

Ketimpangan pendapatan memiliki dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa studi menunjukkan bahwa ketimpangan yang tinggi dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi, sementara pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan. Oleh karena itu, pengurangan ketimpangan pendapatan harus menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi.

**2.5 Penelitian Terdahulu**

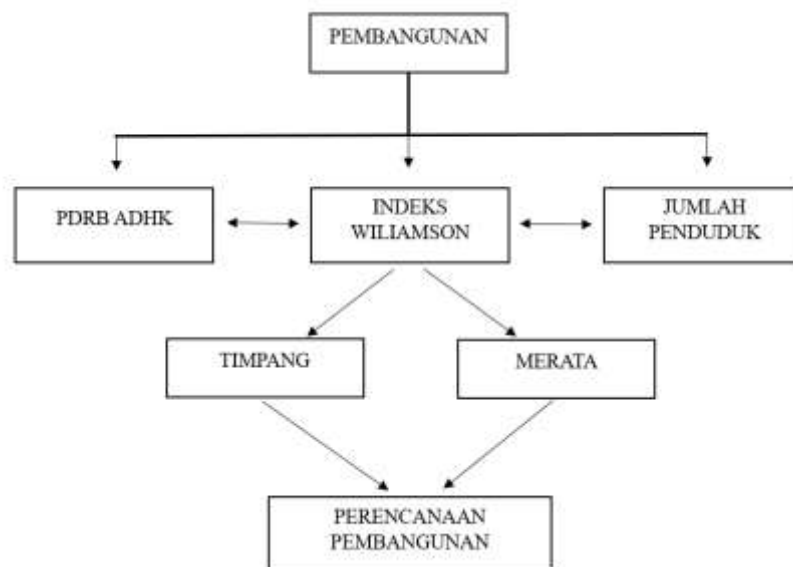
Penelitian ini didukung oleh berbagai penelitian sebelumnya yang membahas ketimpangan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian oleh Cherend Ansyela Sondakh dkk. (2023) menemukan bahwa ketimpangan pendapatan pada empat kota di Sulawesi Utara berada pada kategori rendah hingga sedang berdasarkan Indeks Williamson. Novita Lahengke dkk. (2024) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Sulawesi Utara, sedangkan pembangunan infrastruktur jalan berpengaruh positif terhadap ketimpangan. Elverbinta Br. Gurusinga dkk. (2022) menemukan bahwa ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Sumatera Utara tergolong rendah, dengan investasi meningkatkan ketimpangan dan penyerapan tenaga kerja menurunkannya.

Penelitian lain menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), investasi, infrastruktur, pengangguran, pendidikan, dan jumlah penduduk memiliki hubungan yang berbeda-beda terhadap ketimpangan pendapatan. Beberapa penelitian menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi kemiskinan tetapi belum tentu mampu mengurangi ketimpangan pendapatan secara langsung. Selain itu, keterbukaan perdagangan, penggunaan internet, dan kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor yang memengaruhi tingkat ketimpangan pendapatan di berbagai wilayah.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan masih menjadi masalah di berbagai daerah dan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, pembangunan infrastruktur, investasi, serta kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat ketimpangan pendapatan pada empat kota di Provinsi Sulawesi Utara menggunakan metode Indeks Williamson sebagai alat ukur utama.

**2.6 Kerangka Pemikiran Teoritis**

**Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis**



Berdasarkan landasan teori mengenai ketimpangan pendapatan, analisis dilakukan terhadap empat kota di Provinsi Sulawesi Utara yaitu Kota Manado, Kota Tomohon, Kota Bitung, dan Kota Kotamobagu dengan meninjau tingkat pembangunan masing-masing wilayah. Analisis ini menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan serta jumlah penduduk, dan dihitung dengan metode Indeks Williamson. Melalui perhitungan rata-rata Indeks

Williamson, dapat diketahui apakah terdapat kesenjangan atau justru pemerataan dalam pembangunan di keempat kota tersebut. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah perencanaan pembangunan di wilayah tersebut telah berjalan secara merata atau masih menunjukkan ketimpangan.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Data dan Sumber Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa deret waktu (*time series*) yang mencakup Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita atas dasar harga konstan untuk Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu selama periode 2015 hingga 2024. Data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara.

#### 3.2 Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui metode studi literatur, dengan menghimpun berbagai referensi seperti materi perkuliahan, hasil-hasil penelitian sebelumnya, serta sumber-sumber lain yang relevan. Selain itu, data juga diperoleh dari internet, termasuk situs resmi seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Utara.

#### 3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Untuk menghindari perbedaan penafsiran, maka dalam penelitian ini dijelaskan definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan. Variabel-variabel tersebut meliputi: PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan dan Jumlah Penduduk. Definisi operasional dari kedua variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara 2015-2024 PDRB per kapita wilayah-wilayah administratif di Provinsi Sulawesi Utara dihitung dengan membagi total nilai PDRB masing-masing kabupaten/kota (atas dasar harga konstan) dengan jumlah penduduknya setiap tahun. Perhitungan ini mencakup pengolahan data produksi barang/jasa dan data kependudukan selama periode 2015-2024. indikator ini menggambarkan rata-rata pendapatan masyarakat di tiap wilayah administratif Sulawesi Utara dan diukur dalam satuan rupiah.
2. Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara 2015-2024 Data ini merepresentasikan total populasi resmi di setiap wilayah administratif Provinsi Sulawesi Utara yang dicatat secara tahunan oleh Badan Pusat Statistik dan diukur dalam satuan jiwa.

#### 3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 3.5.1 Analisis Indeks Williamson

Metode Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Indeks Williamson. Indeks Williamson merupakan satuan strumen dalam pengukuran pembangunan wilayah disuatu daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih tinggi. Dengan kata lain, Indeks Williamson secara garis besar mengukur seberapa besar kesenjangan yang ada pada pembangunan pada suatu wilayah. Indeks Williamson merupakan diparitas regional dan tingkat pembangunan yang menggunakan data ekonomi yang sudah maju dan berkembang. Dasar perhitungan Indeks Williamson adalah pendapatan regional perkapita dan jumlah penduduk masing-masing daerah (Mopangga, 2011). Rumus Indeks Williamson adalah sebagai berikut :

$$IW = \frac{\sqrt{\sum(Y_i - Y)^2 f_i/n}}{Y}$$

Dimana:

IW : Indeks Williamson

$Y_i$  : Pendapatan perkapita di daerah studi

$Y$  : Pendapatan perkapita rata-rata daerah referensi

$f_i$  : Jumlah penduduk di daerah studi

$n$  : Jumlah penduduk di daerah referensi

Indeks Williamson ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok yaitu:

$IW < 0,35$  : Ketimpangan taraf rendah

$0,35 < IW < 0,50$  : Ketimpangan taraf menengah

$IW > 0,50$  : Ketimpangan taraf tinggi

Indeks *Williamson* berkisar antara  $0 < IW < 1$ , dimana semakin mendekati nol artinya wilayah tersebut semakin tidak timpang. Sedangkan bila mendekati satu maka semakin timpang wilayah yang diteliti (Syafrizal & Welis, 2008).

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

**4.1 Hasil**

Kondisi dan perkembangan pendapatan yang ada pada Provinsi Sulawesi Utara digambarkan dari besar kecilnya ketimpangan Produk Domestik Regional Bruto perkapita antar Kabupaten/Kota. Dalam melihat ketimpangan pendapatan di Provinsi Sulawesi Utara di analisis menggunakan Indeks Williamson. Indeks Williamson merupakan koefisien persebaran dari rata-rata nilai sebaran hitung berdasarkan estimasi dari nilai Produk Domestik Regional Bruto dan jumlah penduduk yang berada pada lingkup wilayah Kabupaten/Kota. Hasil Analisis Indeks Williamson dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Hasil Indeks Williamson Antar 4 Kota di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015-2024**

Tahun	Indeks Williamson	Keterangan
2015	0,66	Disparitas Tinggi
2016	0,67	Disparitas Tinggi
2017	0,68	Disparitas Tinggi
2018	0,68	Disparitas Tinggi
2019	0,69	Disparitas Tinggi
2020	0,63	Disparitas Tinggi
2021	0,64	Disparitas Tinggi
2022	0,65	Disparitas Tinggi
2023	0,65	Disparitas Tinggi
2024	0,66	Disparitas Tinggi
<b>Rata-Rata</b>	<b>0,66</b>	Disparitas Tinggi

Sumber : Data Diolah

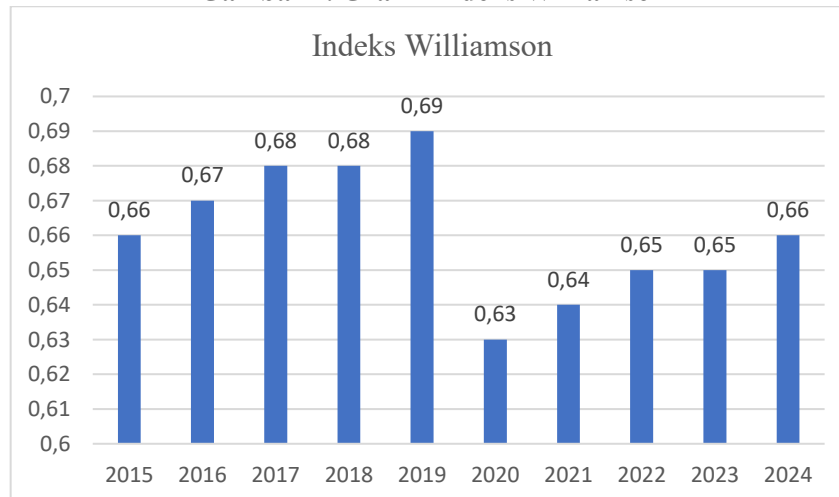
Berdasarkan hasil data Indeks Williamson tahun 2015–2024, menunjukkan bahwa nilai Indeks Williamson selama periode 2015 hingga 2024 berada pada kisaran 0,63 sampai 0,69, dengan rata-rata sebesar 0,66. Berdasarkan kriteria interpretasi, seluruh nilai tersebut termasuk dalam kategori disparitas tinggi, yang berarti ketimpangan pembangunan antarwilayah masih tergolong besar.

Pada periode 2015–2019 terjadi peningkatan bertahap dari 0,66 menjadi 0,69. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan antar wilayah cenderung meningkat sebelum tahun 2020. Pada tahun 2020, Indeks Williamson mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 0,63. Namun demikian, meskipun menurun, nilai tersebut tetap berada dalam kategori disparitas tinggi.

Selanjutnya, pada periode 2021–2024, Indeks Williamson kembali mengalami kenaikan secara perlahan hingga mencapai 0,66 pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan bahwa setelah penurunan pada 2020, tingkat ketimpangan kembali meningkat dan relatif stabil pada level tinggi.

Secara keseluruhan, data tersebut mengindikasikan bahwa selama sepuluh tahun terakhir, ketimpangan pembangunan antar wilayah belum menunjukkan perbaikan yang signifikan, karena seluruh nilai Indeks Williamson tetap berada dalam kategori disparitas tinggi dengan fluktuasi yang relatif kecil.

**Gambar 2. Grafik Indeks Williamson**



Sumber : Data Diolah

Gambar di atas menunjukkan perkembangan Indeks Williamson selama periode 2015 hingga 2024. Indeks ini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan antar wilayah, dengan nilai yang semakin mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Secara umum, grafik memperlihatkan pola yang berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat di awal periode, penurunan tajam di tengah periode, dan kenaikan kembali di akhir periode.

Pada periode 2015 hingga 2019, terlihat adanya tren peningkatan yang cukup konsisten. Nilai indeks pada tahun 2015 sebesar 0,66, kemudian naik menjadi 0,67 pada 2016 dan 0,68 pada 2017 serta 2018. Puncaknya terjadi pada tahun 2019 dengan nilai 0,69. Kenaikan bertahap ini menunjukkan bahwa ketimpangan antar wilayah cenderung membesar selama lima tahun pertama pengamatan. Memasuki tahun 2020, terjadi penurunan yang cukup signifikan, di mana nilai indeks turun menjadi 0,63. Angka ini merupakan yang terendah sepanjang periode yang ditampilkan dalam grafik. Penurunan ini mengindikasikan adanya penyempitan ketimpangan antar wilayah dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus menjadi titik balik dari tren kenaikan yang terjadi sebelumnya.

Pada periode 2021 hingga 2024, indeks kembali menunjukkan tren peningkatan secara bertahap. Nilai indeks naik menjadi 0,64 pada 2021, kemudian 0,65 pada 2022 dan 2023, serta mencapai 0,66 pada 2024. Meskipun mengalami kenaikan kembali, tingkat ketimpangan pada periode ini masih berada di bawah puncak yang terjadi pada tahun 2019.

Secara keseluruhan, grafik menggambarkan dinamika ketimpangan wilayah yang tidak stabil namun relatif berada pada kisaran 0,63 hingga 0,69. Setelah mengalami peningkatan hingga 2019, ketimpangan menurun tajam pada 2020 dan kemudian kembali meningkat secara perlahan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sempat terjadi perbaikan dalam pemerataan, tantangan ketimpangan antar wilayah masih tetap ada hingga tahun 2024. Berdasarkan grafik tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan antar wilayah di 4 Kota pada Provinsi Sulawesi Utara masih tergolong cukup tinggi.

#### **4.2 Pembahasan**

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Williamson, nilai ketimpangan pendapatan antar wilayah pada periode 2015 hingga 2024 berada pada kisaran 0,63 hingga 0,69, dengan rata-rata sebesar 0,66. Seluruh nilai tersebut masuk dalam kategori disparitas tinggi, yang menunjukkan bahwa pembangunan belum merata antar wilayah. Kondisi ini mencerminkan adanya perbedaan signifikan dalam distribusi pendapatan, akses infrastruktur, dan kesempatan ekonomi antara wilayah yang maju dan wilayah tertinggal. Dengan kata lain, meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan tersebut cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu.

Pada periode 2015–2019, Indeks Williamson menunjukkan tren peningkatan bertahap, dari 0,66 pada 2015 menjadi 0,69 pada 2019. Peningkatan ini menandakan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah semakin melebar. Salah satu faktor penyebabnya adalah konsentrasi investasi dan pembangunan infrastruktur di wilayah tertentu, terutama kota besar atau pusat pertumbuhan, sehingga wilayah lain tertinggal dalam hal ekonomi dan pembangunan sosial. Pola ini menunjukkan bahwa disparitas bersifat struktural dan belum terjadi pemerataan yang signifikan.

Pada tahun 2020, Indeks Williamson menurun menjadi 0,63, meskipun tetap masuk kategori tinggi. Penurunan ini kemungkinan terkait dengan dampak pandemi COVID-19, yang menyebabkan perlambatan ekonomi hampir merata di seluruh wilayah sehingga ketimpangan relatif menurun. Namun, periode 2021–2024 menunjukkan kenaikan kembali hingga 0,66 pada 2024, menandakan bahwa pemulihan ekonomi cenderung tidak merata dan wilayah maju kembali mengalami pertumbuhan lebih cepat dibanding wilayah tertinggal. Hal ini menunjukkan bahwa disparitas pendapatan tetap stabil dalam kategori tinggi meskipun terjadi fluktuasi sementara.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah bersifat persistens dan belum menunjukkan perbaikan signifikan dalam sepuluh tahun terakhir. Kondisi ini memiliki implikasi serius terhadap pemerataan kesempatan ekonomi, urbanisasi yang tidak seimbang, dan potensi masalah sosial-ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, seperti redistribusi investasi, pembangunan infrastruktur di wilayah tertinggal, dan penguatan kapasitas ekonomi lokal, agar disparitas antarwilayah dapat ditekan dan pertumbuhan ekonomi lebih merata.

Berdasarkan analisis data Indeks Williamson 2015–2024, dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah tetap tinggi dan bersifat stabil selama sepuluh tahun terakhir. Meskipun terjadi fluktuasi, seperti penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi, secara umum tren menunjukkan bahwa wilayah maju terus tumbuh lebih cepat dibanding wilayah tertinggal, sehingga disparitas tetap berada pada level tinggi. Hasil ini menegaskan perlunya intervensi kebijakan yang lebih efektif dan terarah untuk

mengurangi ketimpangan antar wilayah. Strategi yang dapat dilakukan meliputi pembangunan infrastruktur yang merata, pemerataan investasi, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan ekonomi lokal di wilayah tertinggal. Tanpa langkah-langkah tersebut, ketimpangan pembangunan berpotensi terus berlanjut dan menimbulkan dampak negatif bagi stabilitas ekonomi dan sosial jangka panjang.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis menggunakan Indeks Williamson, tingkat ketimpangan pendapatan antar Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, dan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2015–2024 tergolong tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 0,66. Nilai tersebut menunjukkan bahwa disparitas pendapatan antarwilayah masih cukup besar dan relatif stabil selama periode penelitian. Tingginya ketimpangan tersebut mencerminkan belum meratanya hasil pembangunan ekonomi antar kota di Provinsi Sulawesi Utara. Meskipun seluruh kota mengalami peningkatan jumlah penduduk dan PDRB dalam jangka panjang, perbedaan tingkat perkembangan ekonomi antarwilayah masih menyebabkan kesenjangan pendapatan yang cukup signifikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemerataan pembangunan ekonomi untuk mengurangi disparitas pendapatan antar kota di Provinsi Sulawesi Utara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L. (2009). *Strategi pembangunan ekonomi daerah*. BPFE.
- Arsyad, L. (2010). *Ekonomi pembangunan* (Edisi ke-5). UPP STIM YKPN.
- Basri, F., & Munandar, H. (2010). *Dasar-dasar ekonomi internasional: Pengenalan dan aplikasi metode kuantitatif*. Kencana.
- Boediono. (2002). *Teori pertumbuhan ekonomi*. BPFE.
- Gurusinga, E. B., Engka, D. S. M., & Tolosang, K. D. (2022). Analisis ketimpangan pendapatan antar kabupaten di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(7), 37–48.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi pembangunan: Teori, masalah, dan kebijakan* (Edisi ke-4). UPP STIM YKPN.
- Lahengke, N., Rorong, I. P. F., & Sumual, J. I. (2024). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur jalan terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.
- Mahi, A. K., & Trigunarso, S. I. (2017). *Perencanaan pembangunan daerah: Teori dan aplikasi*. Kencana.
- Mopangga, H. (2011). Analisis ketimpangan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. *Trikonomika*, 10(1), 40–51.
- Noor, A., Fafurida, & Prasetyo, P. E. (2010). Analisis ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Sondakh, C. A., Rorong, I. P. F., & Sumual, J. I. (2023). Analisis ketimpangan pendapatan dan kualitas pertumbuhan ekonomi empat kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(4), 1–12.
- Sukirno, S. (2000). *Makroekonomi modern: Perkembangan pemikiran dari klasik hingga Keynesian baru*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sukirno, S. (2006). *Pengantar teori makroekonomi* (Edisi ke-3). PT RajaGrafindo Persada.

Sukirno, S. (2010). *Makroekonomi: Teori pengantar* (Edisi ke-3). PT RajaGrafindo Persada.

Syafrizal, & Welis, W. (2008). *Ilmu ekonomi regional dan perkotaan*. Baduose Media.

Todaro, M. P. (2011). *Economic development* (11th ed.). Pearson Education.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). *Pembangunan ekonomi* (Edisi ke-9, Jilid 1). Erlangga.